

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anthon F. Susanto. *Dekonstruksi Hukum*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Aziz Syamsudin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang 2005.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Jogjakarta, 2006.
- Buchari Said, *Ringkasan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2005.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- E.T Kanter dan S.R Sianturi *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2007.
- Igim Nurjanah, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Juniver Girsang, *Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publising. Jakarta, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)* :Buku I, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, (Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta S.H)*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Alumni Bandung, Bandung, 1977.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, ed. ke-3 cet. ke-1*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Yudha Bakti Ardhiwisastro. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni Bandung, Bandung, 2000.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

C. Sumber Lain

Aminal Umam. *Penerapan Pidana Minimum Khusus*. Varia Peradilan
Tahun XXV No. 295 Juni 2010. IKAHI. Jakarta.
2010.

Hidayat Mana. *Penerapan Ancaman Pidana Minimal Dalam Putusan
Hakim*. Disampaikan pada Rakerda 4 Peradilan
Lingkungan Mahkamah Agung di Medan. 2010.

Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang
merdeka* "Makalah.

Kapitaselektatindakpidanakorupsi, pusklat MARI, 2003.